

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis yang melanda negeri ini semenjak tahun 1997 ternyata hingga kini tak jua kunjung usai. Berbagai permasalahan kehidupan bangsa seakan menjadi persoalan yang tiada pernah dapat di selesaikan, kendati pun tampak pemerintahan telah berganti berulang kali. Salah satu ekses dari krisis di bidang social adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Secara mencolok fenomena yang bisa kita saksikan hampir di setiap saat adalah merebaknya anak jalanan. Anak-anak yang semestinya hidup dalam asuhan keluarga, anak-anak yang konon adalah generasi penerus dan pewaris masa depan bangsa, bangsa terpaksa harus meninggalkan orang tua dan rumahnya untuk menghidupi dirinya sendiri keberadaan mereka di berbagai sudut kota dari tahun ke tahun di tengarai semakin meningkat jumlahnya dan tidak saja menyebar di kota-kota besar, tetapi juga telah merambat di kota-kota kecil.

Fakta tidak mungkin sekedar berasal dari adanya kemungkinan-kemungkinan, karena fakta akan selalu menyentuh realita. Fakta bahwa usaha pemerintah untuk 'mengentaskan' anak Jalanan belum maksimal adalah sebuah realita. Termasuk fakta bahwa kepedulian masyarakat terhadap mereka sangatlah minim, juga merupakan

realita. Dan tanpa kita sadari, mereka telah kehilangan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Hak mereka yang sudah sekian lama terkebiri oleh represifitas penguasa yang selalu membawa panji 'kebijakan' ; hak yang sudah terampas oleh 'ketidak pedulian' masyarakat dan hak yang sudah terinjak-injak oleh kehidupan sebagian besar masyarakat di Republik ini.

Salah satu latar belakang anak jalanan terdapat di daerah istimewa Yogyakarta, DIY yang kita kenal sebagai kota budaya dan bersih dari keindahan kotanya disini malah sebaliknya Yogyakarta termasuk salah satu banyaknya anak jalanan seperti yang kita lihat setiap hari dari pagi sampai malam di pinggiran trotoar di perempata lampu merah masih banyak anak jalanan. Keseharian mereka hanya hidup dijalan untuk mendapatkan sesuap nasi mereka rela untuk mengemis. Mungkin di lain sisi kita dapat melihat ke depan bagaimana anak-anak yang seumuran mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan kasih sayang orang tua tapi jika kita melihat ke belakang anak jalanan tersebut malah tidak mendapat pendidikan atau bahkan kasih sayang kedua orang tua, mereka di tampung di salah satu LSM yang katanya bisa mendidik mereka dan bisa seperti anak-anak lainnya. Pemerintah memberikan dana untuk mengelola LSM tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak-anak jalanan tersebut tapi kenyataannya banyaknya LSM yang ada DIY masalah anak jalanan tersebut tidak bisa di tuntaskan apa ini berarti anak-anak tersebut tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak ?

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kota Yogyakarta termasuk salah satu kota yang rentan dengan persoalan anak jalanan. Keberadaan dan kecenderungannya terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di kota ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis yang berada di jalur persimpangan lalu lintas kota-kota besar di pulau Jawa sehingga mudah untuk dijangkau baik sebagai daerah tujuan maupun sekedar sebagai tempat persinggahan sementara. Sikap masyarakat Yogyakarta yang sangat permisivi terhadap keberadaan anak jalanan juga menjadi faktor pendukung yang turut menyumbang merebaknya anak jalanan di kota ini, membuat mereka betah bermukim dan memberi peluang bagi anak yang rentan jalanan untuk turun ke jalan. Kemudian dalam mengais rezeki di jalan juga menjadi daya tarik yang melahirkan fenomena ikut turunnya anak-anak kampung kampung yang ada di wilayah kota Yogyakarta ke jalanan. Kondisi ini diindikasikan dengan banyaknya anak jalanan setelah waktu pulang sekolah. Daya tarik anak jalanan tersebut sering pula dimanfaatkan orang tua untuk mengeksploitasi anak-anak sebagai sumber pencari nafkah keluarga.

Di kota Yogyakarta tak beda dengan kota lain anak-anak jalanan pada umumnya telah membentuk komunitas dengan aturaan tersendiri. Titik-titik komunitas anak jalanan yang tersebar di kota ini terutama terdapat di perempatan atau pertigaan jalan seperti : perempatan Gondomanan, Korem, Lempuyangan, Pojok Beten, Gading, Wirobrajan, Jetis, Duta Wacana, Menteri Supeno, Gejayan dan lain-lain. Secara pasti jumlah anak jalanan yang ada memang tidak pernah terpantau

mengingat mobilitasnya yang sangat tinggi namun di perkirakan pada tahun 2001 berjumlah antara 450 sampai dengan 550 anak¹.

Jumlah anak jalanan yang berkeliaran di kota Yogyakarta semakin meningkat. Peningkatan tersebut sangat terasa pada 2009 ini. Sebab sejak awal tahun 2009, Dinas Ketertiban telah menjaring sebanyak 1.363 anak jalanan. "Anak jalanan yang ditertibkan selama 2009 ini meningkat dari tahun sebelumnya, namun mayoritas dari mereka bukan penduduk asli Yogyakarta," kata Pontjosiwi, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Dari jumlah 1.363 anak jalanan tersebut, hanya 312 anak jalanan (22,18 persen) yang merupakan penduduk kota Yogyakarta. Kemudian sebanyak 967 anjal (70,98 persen) berasal dari luar Yogyakarta, dan sisanya tidak jelas. Anak jalanan yang usianya anak-anak jumlahnya 370 orang, sedangkan yang berusia dewasa jumlahnya 809 orang.

Pontjosiwi mengungkapkan, untuk menekan keberadaan anak jalanan di Kota Yogyakarta, pihaknya memasang papan pengumuman di sejumlah titik. Papan pengumuman itu berisi himbauan agar para pengguna jalan tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada anjal. "Papan pengumuman sudah kami pasang di 16 titik dan tersebar di kota Yogyakarta," jelasnya.

Menurut Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, pihaknya belum memiliki sistem yang tepat untuk pengentasan anak jalanan, karena sebagian besar anak

¹ DKSPM Kota Yogyakarta, Agustus 2002

jalanan berasal dari luar Yogyakarta. “Mobilitas anak jalanan yang datang dari luar Yogyakarta cukup tinggi, butuh sistem yang tepat untuk menangani mereka. Kita ingin bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten untuk bersama-sama mengentaskan masalah anjal,” kata dia.

Menurut Sudarmaji, salah satu aktivis yang menangani 25 anak jalanan di Jalan Urip Sumoharjo, seharusnya pemerintah segera memberi solusi tepat untuk menangani anak jalanan seperti pengaktifan kembali Balai Pelatihan Kerja. “Pemerintah jangan hanya main garuk saja, namun berilah mereka (anak jalanan) ruang untuk berlatih kerja dan disediakan lapangan kerja, sehingga mereka tidak kembali ke jalanan,”

Realitas juga menunjukkan bahwa anak jalanan di anggap sebagai anggota masyarakat kelas dua dimana haknya sebagai warga Negara pantas di abaikan kehidupan mereka teralienasi dari masyarakat kelas dua di mana haknya sebagai warga Negara pantas di abaikan kehidupan mereka teralienasi dari masyarakat umum sehingga anak jalanan cenderung untuk membentuk komunitas seperti paparan di atas.

Perlakuan yang kurang berperikemanusiaan dalam penertiban anak jalanan dan pengasingan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk perlakuan tidak adil dari Negara dan masyarakat. Negara dalam hal ini di anggap tidak mampu melaksanakan amanat dalam pasal 34 ayat 11 UUD 1945. Ayat dalam pasal ini secara jelas

menyebutkan bahwa *fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara*. Namun dalam prakteknya Negara di pandang tertangani secar tuntas anak jalanan menjadi salah satu imbas dari kebijakan yang di langgar sendiri oleh Negara².

Beberapa element masyarakat sebenarnya sudah berupaya berkontribusi dalam penanganan masalah Anjal, misal dengan mendirikan Rumah Singgah. Di Rumah Singgah inilah anak Jalanan di tampung dan dibina dengan memberikan ‘pelatihan’ kemandirian bagi mereka, dan berbagai macam aktivitas yang ada di Rumah Singgah tersebut. Namun, antara Rumah Singgah dan Pemerintah masih seperti nampak ada jurang yang memisahkan mereka. *Simply*, keduanya belum sinergis dalam mengimplementasikan gagasan. Sama-sama ingin mengentaskan Anak Jalanan, namun dengan perspektif dan metode yang berbeda. Sampai kapan hal ini akan terjadi?

Harus di akui, bahwa Rumah Singgah juga belum cukup memiliki formulasi gagasan ideal untuk mengatasi permasalahan komunitas ini dalam mengembangkan ide pemberdayaan dan kemandirian Komunitas karena adanya keterbatasan dana dan SDM pengelola Rumah Singgah. Untuk menemukan apa, kenapa dan bagaimana solusi ini semua maka diperlukan eksplorasi masalah dan pemikiran antar Rumah Singgah agar eksistensi Rumah Singgah benar-benar mampu diharapkan sebagai pijakan awal penanganan komunitas Bangjo ini. Dan saya pikir, pemerintahlah yang

² “Anak Jalanan Tanggung Jawab Siapa?”, Pabelan Pos,Solo,Edisi 48 Tahun 2001

akan menjadi fasilitator dan membantu menyiapkan SDM dan manajemen RS agar lebih tertata.

Di lain sisi, LOD (Lembaga Ombudsmaan Daerah) propinsi DIY tahun 2007 pernah memunculkan beberapa rekomendasi atas kegiatan Workshop yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2007. Di antaranya adalah merespon Raperda Gelandangan, Anak Jalanan dan Gepeng. Dari respon tersebut muncul kebutuhan untuk menolak Raperda Gelandangan, Anak Jalanan dan Gepeng, karena ada kesalahan cara pandang pemerintah terhadap kelompok rentan yang diatur dalam Raperda tersebut. Pendekatan bahwa gelandangan, anak jalanan dan Gepeng adalah sampah masyarakat dan harus ada tindakan yang lebih menonjolkan pendekatan represif, seolah tidak memberikan solusi sistemik. Hal ini tidak semata ditujukan kepada pemerintah saja, namun kepada siapapun yang punya kepentingan ; masyarakat, LSM, dan semua lapisan masyarakat.

Menurut hasil laporan pemetaan dan survei yang dilakukan kantor departemen sosial Yogyakarta 1999, terdapat sekitar 1300 anak jalanan yang tersebar di sejumlah wilayah kantong. Definsi anak di sini adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Jenis pekerjaan yang dilakukan pun bervariasi, seperti pengamen, penyemir sepatu, pemulung, kernet, pencuci kaca mobil, pekerja seks, pengemis, dan sebagainya. Tetapi semuanya adalah pekerjaan informal dengan upah ala kadarnya, bergantung kepada si pemberi/pemakai jasa. Survei menunjukkan bahwa hampir

70% anak jalanan melakukan pekerjaan sebagai pengamen. Kehadiran anak jalanan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kota-kota besar. Anak jalanan merupakan fenomena kota besar di mana saja. Semakin cepat perkembangan sebuah kota semakin cepat pula peningkatan jumlah anak jalanan. Kehidupan di kota-kota besar yang tampak serba gemerlap dengan pernik-pernik kebebasannya ibarat sinar lampu yang mengundang anai-anai.

1.a Faktor Pendorong

Banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas-fasilitas umum di kota-kota, bukan melulu disebabkan oleh faktor penarik dari kota itu sendiri. Sebaliknya adapula faktor-faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, percekocokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnyakekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Keadaan rumah tangga yang demikian sangat potensial untuk mendorong anak lari meninggalkan rumah. Faktor lain yang semakin menjadi alasan anak untuk lari adalah faktor ekonomi rumah tangga. Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, semakin banyak keluarga miskin yang semakin terpinggirkan. Situasi itu memaksa setiap anggota keluarga untuk paling tidak bisa



menghidupi diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan.

1.b Anak-Anak Yang Dipaksa Dewasa

Kehidupan yang keras di jalan, ditambah situasi anak itu sendiri di mana mereka harus bertahan hidup, memaksa anak-anak ini menjadi dewasa sebelum waktunya. Apabila anak-anak sebaya mereka masih bermain-main dan dirawat oleh orang dewasa, maka anak-anak jalanan ini sudah harus menghidupi diri sendiri dan mempertahankan hidup.

Seiring dengan wacana tersebut NGO (non government organization) atau yang lebih kita kenal dengan sebutan LSM (lembaga swadaya masyarakat) terlihat mulai mengambil bagian dan berperan terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Demikian juga dengan isu ketidakadilan dan tersingkirnya anak-anak bangsa dari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagaimana yang di alami oleh anak jalanan. Belasan LSM yang ada di kota Yogyakarta secara aktif turut pula dalam penanganan anak jalanan. Aktivitas mereka terkadang di pandang sebagai pemanfaatan dana, pemenuhan ambisi dan kebutuhan anggotanya dari pada sebagai sebuah aktivis yang dilandasi oleh kesadaran dan idealism untuk membangun civil society. Gusdur pernah berkata , “LSM itu tahu apa, hidup di kota, dapat sumbangan dari mana-mana. Mereka itu parasit. Mereka buat program anti ini,

anti itu supaya sumbangan datang , tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa³. Sebegitu burukkah citra LSM termasuk yang ada di kota Yogyakarta? Bagaimana pula kiprah dan pencapaian mereka dalam upaya turut membangun masyarakat? Sudahkah upaya mereka tersinergi dengan program pemerintah daerah dalam era otonomi in? pertanyaan ini memerlukan jawaban yang realistis meski tidak bisa bersifat generalis.

Menurut Rumah Singgah anak mandiri Yayasan Insan Mandiri yang banyak berkecimpung dalam penanganan anak jalanan, seorang anak dapat di kategorikan sebagai anak jalanan jika memenuhi criteria Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta sampai sekarang berhasil mengembalikan sekitar 80 anak jalanan di kota ini ke bangku sekolah, sekaligus kembali ke pangkuan keluarga mereka masing-masing.

"Allhamdulillah kami sampai sekarang bisa mengembalikan anak jalanan ke orangtuanya, dan memasukkan kembali mereka ke sekolah, setelah ditinggalkan karena `bekerja` di jalanan," kata Ketua Yayasan Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta Nyadi Kasmorejo⁴. Ia mengatakan sejumlah anak jalanan setelah memperoleh pendampingan dari tim yayasan RSAM Yogyakarta kemudian dikirim ke sekolah maupun lembaga pendidikan luar sekolah. Ada yang sekolah di SMK negeri, mengikuti kejar paket, kursus teknisi studio dan bahasa Inggris.

³ "Presiden :LSM Jangan Jadi Parasit ", Kompas Kamis,2 Maret 2000

⁴ ANTARA News Logo

"Semua biaya sekolah atau pendidikan ditanggung yayasan, sehingga mereka tidak perlu memikirkan lagi mencari biaya sekolahnya. Bagi mereka yang penting adalah kemauan keras untuk mengikuti pembelajaran, baik di sekolah maupun di tempat kursus,"

Yayasan RSAM Yogyakarta sampai kini mendampingi 99 anak jalanan. Dari jumlah tersebut, 15 anak di antaranya ditampung di RSAM, dan yang lainnya di panti asuhan milik yayasan. Mereka yang ditampung di RSAM memperoleh pembinaan dengan diberi pelatihan keterampilan, meskipun mereka masih diperbolehkan 'turun' ke jalanan.

Sedangkan yang ditempatkan di pantai khusus, mereka dibina dan menyatakan mau kembali ke sekolah. Namun, mereka dilarang kembali ke jalanan. Sebab, mereka dipersiapkan untuk kembali ke lingkungan keluarganya.

"Program pendampingan anak jalanan sebenarnya bertujuan untuk mengurangi jumlah anak yang 'bekerja' di jalanan, baik sebagai pengamen maupun pengemis. Bagi anak yang 'bekerja' di jalanan sangat berbahaya, karena kehidupannya sangat keras. Fungsi RSAM adalah wahana untuk mempertemukan anak dan pihak yang akan membantu.

Ada dua tujuan penanganan anak jalanan di LSM rumah singgah anak mandiri yaitu :

1. Menarik mereka dari jalanan dengan cara di kembalikan kepada keluarganya, menciptakan keluarga pengganti, atau di rujuk lembaga pelayanan seperti panti

2. Memberdayakan anak-anak yang tidak mungkin di tarik dari jalanan dengan cara memberikan bekal ketrampilan, pengetahuan, sikap dan keyakinan sehingga mereka memiliki pertahanan diri berada di jalan.

Merujuk kepada uraian di atas penulis merasa tertarik untuk bisa mengkaji secara mendalam dan lebih jauh persoalan sosial-pemerintahan serta membatsi kajian ke dalam sebuah judul skripsi “.analisis terhadap peran lembaga swadaya masyarakat rumah singgah anak mandiri yayasan insan mandiri Yogyakarta, dalam penanganan masalah anak jalanan tahun 2008-2009. Penulis menarik kesimpulan tentang LSM insan mandiri Kajian ini di harapkan tidak saja bernilai akademis melainkan juga memberikan manfaat empiris terhadap persoalan nyata yang ada di tengah masyarakat kita.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas mengingat bahwa kajian utamanya adalah analisis terhadap peran lembaga swadaya masyarakat rumah singgah anak mandiri yayasan insan mandiri Yogyakarta, dalam penanganan masalah anak jalanan tahun 2008-2009. Maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana peran LSM Rumah Singgah Anak Mandiri Yayasan Insan Mandiri dalam penanganan anak jalanan di Yogyakarta tahun 2008-2009 ?

C. KERANGKA DASAR TEORI

1. Lembaga Swadaya Masyarakat

a. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

UU RI NO.4 Tahun 1982 menyebutkan bahwa LSM adalah: ⁵

“Organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup”

Sementara itu, INMENDAGRI No.8 tahun 1990 menyebutkan bahwa LSM adalah: ⁶

“organisasi / lembaga yang di bentuk oleh masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang di tetapkan oleh organisasi /lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dsn kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya”

UU RI No. 4 tahun 1982 mendefinisikan LSM untuk kelompok yang bergerak pada kegiatan lingkungan hidup saja. INMENDAGRI No. 8 1990 lebih luas mendefinisikan kegiatan LSM.

⁵ UU RI No. 4 tahun.1982, *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pegelolaan Lingkungan Hidup*, Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1982

⁶ INMENDAGRI No.8 Tahun 1990, *Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Dept. Dalam Negri,1994, Hal.17

Definisi-definisi yang di keluarkan pemerintah membuktikan bahwa keberadaan LSM diakui. Dia bukan lembaga liar, apalagi pemberontak. Undang-Undang mengakui peranannya dalam proses pembangunan di Indonesia.

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, penulis berkesimpulan yang di maksud dengan LSM adalah :

Organisasi/ lembaga yang di bentuk oleh masyarakat dengan sukarela atau keinginan sendiri di tengah masyarakat dalam memfasilitasi proses pemecahan masalah di masyarakat.

b. Mekanisme kerja faktor pendukung dan penghambat LSM

LSM di pimpin oleh seorang direktur pelaksana. Direktur pelaksana di pilih oleh badan pengurus. Direktur pelaksana melaksanakan kebijakan badan pengurus.

Pada awalnya mekanisme kerja di LSM cenderung fleksibel, di sesuaikan situasi, kondisi dan kesepakatan. Bekerja bersama-sama tanpa mekanisme yang jelas, jadi di LSM tidak berlaku sisten kerja yang kaku. LSM besar mulai bekerja professional aturan main kaku mulai di laksanakan untuk mencapai tujuan. Adanya pertanggung jawaban akan setiap bagian sehingga di kenal adanya audit keuangan serta evaluasi. Hal-hal admistratif menjadi sangat teratur, laporan kegiatan jelas, proses pendampingan bisa di amati dengan baik dan sistematis, dokumentasi dan metodologi bisa di terangkan dengan baik.

Faktor pendukung pesatnya jumlah perkembangan LSM adalah :⁷

- a. Jumlah kaum miskin yang sangat banyak
- b. Meningkatnya jumlah kaum miskin intelektual dan kaum professional muda
- c. Angka pengangguran
- d. Tingginya meningkatnya sifat keterbukaan
- e. Kuatnya solidaritas dan jaringan LSM
- f. Informasi yang di sebarakan oleh pers

Faktor penghambat perkembangan kualitas LSM adalah :

- a. Perbedaan latar belakang kelahiran LSM
 - b. Manajemen yang terlalu partisipatif
 - c. Pintaran-pintaran dalam arti kata karena adanya permasalahan yang kompleks dalam masyarakat sehingga LSM merasa pintar dan kemudian tidak mau lagi belajar.
- 2. Peran lembaga swadaya masyarakat**

Berbicara mengenai peranan , hal ini berkaitan dengan seorang individu, lembaga atau organisasi dalam usahanya menjalankan fungsi utamanya. Sedangkan pengertian peranan dalam kamus bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa peranan bagian dari tugas utama yang di laksanakan⁸.

⁷ Ibid Hal6-62

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Puastaka, Jakarta, 1993, Hal.667.

Menurut Ralph Linton tentang peranan menyatakan bahwa peran mencakup tiga hal utama, yaitu⁹ :

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatannya.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat di katakana sebagai perilaku individu yang penting bagi structural sosial .

Dari pandangan di atas dapat dinyatakan di atas dapat di nyatakan bahwa peranan merupakan suatu tugas utama yang di lakukan atau organisasi sebagai bagian dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah di tentukan dan dirumuskan.

Keberadaan LSM dalam kehidupan suatu Negara akhir-akhir ini tidak di sangsikan lagi keberadaannya dalam memainkan peranan yang oleh Negara tidak dapat di lakukan, justru oleh kalangan LSM di lakukannya. Hal ini karena beberapa kelebihan dari LSM yang tidak memiliki pemerintah, diantaranya kegiatan yang yang dapat mencapai masyarakat paling bawah yang oleh pemerintah yang membeli-belit, dana yang di perlukan cukup besar dan sebagainya, yang pada gilirannya program itu

⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu : Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 146

jarang sekali menyentuh masyarakat paling bawah. Hanya elit-elit daerah tertentu saja yang dapat mengenyam dan merasakannya.

Sebenarnya cukup banyak peranan-peranan yang dapat di mainkan oleh LSM dalam sebuah Negara, terutama LSM-LSM yang ada di Indonesia. Dari hal-hal yang bersifat politik, sosial,budaya, bahkan pada bidang keagamaan (religious). Jadi peranan-peranan yang dilakukan oleh LSM tersebut menurut Noeleen Heyzer, mengidentifikasikan tiga jenis peranan yang dapat di mainkan oleh LSM, antara lain¹⁰.

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “grassroots” yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas melalui jaringan sama baik dalam suatu Negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Dari pendapat Heyzer tersebut dapat di ketahui, bahwa LSM dapat memainkan peranan pada dataran arus bawah melalui pemberdayaan masyarakat tingkat bawah dan juga dapat bermain dalam dataran tingkat atas, yakni melalui upaya-upaya loby untuk mempengaruhi kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Dengan mengacu pada pendapat yang di kemukakan oleh Heyzer di atas maka Afan Gaffar menggolongkan peranan LSM ke dalam dua kelompok besar yaitu

¹⁰ Affan Gaffar&Abdul Gaffar, *Negara dan masyarakat sipil (diklat kuliah sosial politik) jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas isipol UGM,1997,Hal.51*

peranan dalam bidang non politik melalui pemberdayaan masyarakat bidang sosial, ekonomi dan peranan dalam politik yaitu sebagai wahana untuk menjembatani antara masyarakat dengan Negara dan pemerintah¹¹.

3. Anak jalanan

a. Pengertian anak jalanan

Secara umum anak jalanan adalah¹²

1. Berada di tempat-tempat umum (jalan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam/hari
2. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas kelurganya)
3. Melakukan aktifitas ekonomis (melakukan pekerjaan pada sector-sektor informal).

Kondisi yang memaksa anak untuk berkeliaran atau mencari nafkah di jalanan dengan menghabiskan sebagian besar waktunya merupakan penyimpangan fungsi social anak. Penyimpangan lainnya juga terjadi terhadap hak-hak anak adalah terbaikannya pelayanan kesehatan, pendidikan, bermain dan waktu luang, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (makanan, air bersih dan tempat untuk hidup), mempelajari kebudayaan, kebebasan dari eksploitasi, terbebas dari penggunaan dan

¹¹ Ibid, 52

¹² Nusa Putra, *Potret Buram Anak Jalanan*, Yayasan Nada Dian Nusantara, Jakarta, 1993

peredaran narkoba, hak perlindungan hukum, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi maupun hak bimbingan untuk memainkan peranan dalam masyarakat sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.¹³

Indicator yang jelas dari keberfungsian social adalah kemampuan mengatur diri sendiri, berhubungan dengan orang lain dan mengendalikan kesulitan. Dengan demikian dalam konteks anak jalanan bermasalah karena ada beberapa situasi, relasi dan peranan anak yang tidak dapat di lakukan olehnya.

Definisi mengenai anak jalanan itu beragam. Berikut akan di jabarkan pendapat menurut beberapa ahli yaitu : menurut Soedijar anak jalanan adalah anak-anak usia 7-15 tahun yang bekerja di jalan raya dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya.¹⁴

Menurut Arum R.Kusumanegara dan kawan-kawan. Mengungkapkan ada dua kelompok pandangan mengenai anak jalanan yakni :

- a. Anak jalanan adalah anak yang melakukan kegiatan di jalan, pasar, terminal dan di tempat-tempat umum lainnya guna memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk membantu keluarga.
- b. Anak jalanan adalah anak-anak yang melakukan kegiatan di jalan, tidak melakukan tujuan yang jelas dan mengganggu ketertiban umum.¹⁵

¹³ Departemen Sosial RI, Direktorat Kesejahteraan Anak, keluarga dan Lanjut Usia 2001 Intervensi Psikososial.Jakarta Hal 21

¹⁴ Soedijar, Sosiologi Kontemporer.1989.Jakarta Hal 4

¹⁵ Kusumanegara,Pemantapan Pekerja Sosial. 1994, Yogyakarta Hal.5

Menurut Hadi Utomo menyebutkan empat kategori anak jalanan yaitu :

1. Anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalanan (gelandangan). Mereka ini pada umumnya jarang atau hampir tidak pernah pulang ke keluarganya atau memang sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarganya.
2. Anak yang mencari penghidupan di jalanan tetapi mempunyai tempat tinggal tetap seperti mengontrak atau di tampung oleh panti-panti atau rumah singgah dengan di berikan bekal ketrampilan, pendidikan, pemberdayaan bahkan perlindungan hukum dan lain-lain.
3. Anak yang mencari penghidupan di jalanan dan pulang ke rumah tiap hari.¹⁶

Menurut Yayasan Bina Sejahtera Indonesia yang banyak berkecimpung dalam penanganan anak jalanan seorang anak dapat di kategorikan sebagai anak jalanan jika memenuhi criteria sebagai berikut :

1. Anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalanan dengan cirri-ciri :
 - a. Hidup mandiri dan bebas
 - b. Tidur di sembarang tempat atau daerah tertentu sebagai daerah mangkal.
 - c. Mencari nafkah dimanapun mereka berada atau mempunyai pekerjaan tetap seperti pemulung, pengemis, penyemir sepatu
 - d. Tidak ada hubungan dengan orang tua atau jarang berhubungan dengan orang tua.

¹⁶ Hadi Utomo. Metodologi Riset, 1999, Yogyakarta. Hal. 8

- e. Mobilitas cukup tinggi, perpindahan dari satu tempat mangakal ketempat lainnyadi dalam kota atau bahkan pindah kota.
2. Anak yang hidup dan mencari penghidupan di jalan dengan cara-cara tertentu:
 - a. Mencari nafkah dengan usaha-usaha tertentu, seperti pedagang asongan, jual koran, semir sepat, calo, kuli angkut barang di pasar.
 - b. Tidur bersama kelompoknya dengan cara sewa kamar kuran kecil untuk 5-15 anak atau tidur di suatu tempat tanpa baya seperti masjid,kamar yang disediakan oleh pedagang kelontong dengan catatan anak asong harus membeli barang dagangannya dari pemilik kelontong tersenut.
 - c. Hubungan dengan keluarga di lakukan sekitar 1-3 bulan.
 3. Anak yang mencari nafkah di jalan tetapi pulang ke rumah tiap hari ciri-cirinya :
 - a. Masih ada hubungan dengan keluarga/ orang tua tetap hubungan kejiwaan tidak hangat
 - b. Tidak sekolah/putus sekolah SD atau SMP
 - c. Rumah sempit dan di daerah kumuh
 - d. Anak berperan sebagai “bread winner” dalam keluarga
 - e. Pengaruh perilaku jalanan lebih dominan dari pada pengaruh keluarga.

c. Akar tumbuh berkembangnya pekerja anak

Fenomena pekerja anak secara umum pada awalnya muncul dari kebiasaan atau tradisi dan budaya membantu orang tua. Tradisi seperti ini banyak dianut masyarakat Indonesia pada umumnya. Suatu kebiasaan memberikan pekerjaan kepada anak di dalam keluarga untuk membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga sampai berkembang pada upaya-upaya mencari nafkah.

Selain berpandangan bahwa anak mempunyai nilai ekonomis, sebagian besar orang tua beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak-anak merupakan upaya proses belajar, yaitu belajar untuk menghargai kerja dan tanggung jawab. Selain dapat melatih dan memperkenalkan anak kepadadunia kerja, orang tua juga berharap dapat membantu mengurangi beban kerja keluarga.¹⁷

Seiring dengan berkembangnya waktu, fenomena anak jalanan yang bekerja banyak berkaitan erat dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendapatan orang tua yang sangat sedikit tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa mereka untuk mengikuti pendidikan. Dalam kondisi ini anak-anak kehilangan beberapa kesempatan yang seharusnya dialami pada masa kecilnya, seperti kesempatan bermain dan kesempatan belajar.

¹⁷ Dr. Nachrowi D. Nachrowi dan Ir.Salahudin A.Muhidin, *Pekerja Anak dan Pembangunan Kelurga*, Lembaga Demografi FE UI, Jakarta, 1997, hal. 103

Transisi lanjutan terhadap munculnya pekerja anak lebih tampak pada dasawarsa terakhir, sejalan dengan kompleksitas kehidupan sebagai konsekuensi pembangunan. Pekerja anak muncul tidak terbatas pada kondisi kemiskinan ekonomi keluarga, namun telah bergeser pada sebab-sebab permintaan pasar tenaga kerja, adanya relokasi-relokasi industry dari Negara lain dan kondisi broke home yang semakin sering dialami keluarga modern. Kondisi terakhir ini menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan krusial sehubungan dengan terancamnya masa depan dan keberadaan anak oleh situasi-situasi pekerja anak terutama di kota-kota besar. Di desa fenomena pekerja anak terutama di kota-kota besar. Di desa fenomena pekerja anak relative tidak memunculkan permasalahan terhadap keberadaan anak, karena kondisi pekerjaan yang wajar dan dekat anak-anak dalam pemantauan keluarga.

d. Anak jalanan dan pekerja anak

Pekerja anak dan anak jalanan cenderung mempunyai karakteristik sama, yaitu biasanya berada dalam posisi terlantar. Namun keduanya dapat di bedakan jenis sehubungan dengan pola hidup dan permasalahan yang di hadapi masing-masing. Ada sesuatu pendapat yang mengatakan bahwa anak jalanan adalah pekerja anak informal, karena mereka sebenarnya bekerja di jalan. Tetapi sisi kehidupan anak jalanan tidak cukup dilihat dari aspek kehidupan.¹⁸ Bahkan ppada beberapa anak jalanan bekerja bukan merupakan hal yang mutlak bagi mereka

¹⁸ Tata Sudarajat, *Anak Jalanan dari Permasalahan Sehari-hari sampai Kebijakan*, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, 1995, ha.85

persoalan sebenarnya bukan pekerja atau tidak bekerja, melainkan bagaimana harus tetap hidup. Dengan demikian anak-anak jalanan seperti ini tidak bisa di masukkan sebagai anak-anak yang menggelandang.

e. Penggolongan anak jalanan

Dari pengalaman- pengalaman di lapangan dalam suatu advokasi yang dilakukan LSM di peroleh penggolongan terhadap anak jalanan yaitu :

1. Children of the street, yaitu anak yang putus hubungan dengan orang tuanya , tidak sekolah dan tinggal di jalanan atau di sebut anak yang hidup di jalanan.
2. Children on the street, yaitu anak yang berhubungan tidak teratur denagn orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sebulan, dua bulan atau tiga bulan, di sebut juga anak yang bekerja di jalanan.
3. Vulnerable to be street children, yaitu anak yang masih tinggal dengan orang tuanya, tiap hari pulang ke rumah, masih sekolah atau sudah putus sekolah di sebut juga sebagai anak yang rentan menjadi anak jalanan¹⁹.

b. Penyebab Keberadaan Anak Jalanan dan Permasalahannya

Bagi pemerintah dan LSM maupun institusi lain yang peduli terhadap persoalan pelayanan sosial khususnya terhadap anak jalanan merupakn suatu hal penting untuk mengetahui penyebab keberadaan anak jalanan. Karena dengan demikian akan dapat di tentukan tindakan solutif yang tepat bagi anak jalanan untuk

¹⁹Opcit hal.32

mengentaskan dan memberdayakan mereka agar menjadi generasi masa depan bangsa yang baik.

Mengapa anak jalanan muncul dan makin meningkat secara kuantitas? Banyak yang mempertanyakan tanggung jawab Negara atau pemerintah dalam menangani problem sosial ini. Arie Sujito memandang penataan tentang kebijakan industry di perkotaan sebagai problem makronya. Efek industrialisasi lebih mendorong dan mengejar pertumbuhan ekonomi fiscal dan jumlah, tetapi tidak melihat segi kualitatifnya. Penanganan terhadap anak jalanan yang cenderung parsial (tidak tersinergi antara berbagai stakeholder) dan tidak pernah menyentuh akar persoalan juga di anggap sebagai penyebabnya²⁰. Di luar pendapat di atas, secara cukup lengkap Direktorat Kesejahteraan Anak, keluarga dan lanjut usia Deputi Bidang kesejahteraan Sosial Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) telah melakukan identifikasi atas faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan kedalam tiga tingkatan. Ketiga tingkat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tingkat mikro (faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarga)

Pada tingkat mikro, sebab-sebab yang dapat di definisikan dari anak dan keluarga dapat saling berkaitan atau berdiri sendiri, yakni : lari dari keluarga, disuruh bekerja (yang masih sekolah atau putus sekolah), berpetualangan, bermain-main, atau di ajak teman ; dan penyebab dari keluarga ; terlantar, ketidakmampuan orang tua

²⁰ Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 12 Februari 2002, Hal 6

menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga/tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang berakibat anak menghadapi masalah fisik, psikologis, dan sosial²¹.

b. Tingkat Messo (faktor masyarakat)

Pada tingkat ini penyebab yang dapat diidentifikasi meliputi pada masyarakat miskin yaitu anak adalah aset untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga, sehingga secara sengaja anak di mobilisasi oleh orang tua untuk mencari nafkah pada masyarakat lain urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anaknya mengikuti. Selain itu juga penolakan masyarakat (alienasi) dan anggapan (stigma) bahwa anak jalanan selalu melakukan tindakan tidak terpuji, amoral maupun criminal²².

c. Tingkat Makro (faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat)

Pada tingkat ini penyebab yang dapat diidentifikasi meliputi : ekonomi yakni adanya peluang pekerjaan sector informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian, pendidikan yakni biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan belum seragamnya unsure pemerintah memandang anak jalanan, sebagian berpandangan anak jalanan merupakan kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan/ pelayanan sosial) dan sebagian yang lain memandang anak jalanan sebagai pembuat masalah (pendekatan keamanan)²³.

²¹ Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 12 Februari 2002, Hal 26

²² Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 12 Februari 2002, Hal 26

²³ Analisis Kehidupan Anak Jalanan, 2000. Yogyakarta. Hal 26

Jalanan sebagai ruang terbuka (siapa pun bisa masuk dan mengadu nasib) bukan tempat yang pantas bagi kehidupan dan masa depan anak-anak. Jenis-jenis pekerjaan di jalanan yang tidak membutuhkan persyaratan formal, kecuali kekuatan fisik, keberanian dan modal usaha yang tidak terlalu banyak, telah menjadi pesona tersendiri. Karena sifatnya yang terbuka dan longgar terhadap norma, maka pekerjaan juga beragam baik yang tergolong positif (seperti pengamen, pengasong, pemulung) maupun yang tergolong negative (seperti penodong, pemalak, preman, pemerias dan pelacur). Anak dengan kemampuan yang terbatas dalam menilai dan juga di dorong oleh keadaan untuk bisa survive menjadi sangat sulit untuk membedakan antara yang positif dengan yang negative, sehingga ada beberapa perilaku yang terinternalisasi dalam pola perilaku mereka. Hal inilah yang kemudian juga turut membangun stigma negative masyarakat terhadap perilaku maupun penampilan anak jalanan.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan adanya anak jalanan yaitu situasi sosial yang terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat, dimana anak tersebut tinggal. Lingkungan itulah yang merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak, sebelum perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan seorang anak keluar dari lingkungan sosial dan menjadi anak jalanan. Perubahan tersebut antara lain kesulitan ekonomi keluarga atau perceraian orang tua, biaya sekolah yang tinggi atau penolakan warga masyarakat sekitar yang menyebabkan anak-anak menjadi korban dan tidak dapat hidup layak lagi untuk dapat tumbuh secara wajar.

Faktor-faktor tersebut merupakan institusi-institusi yang dinamis dalam arti bahwa di dalamnya menyiratkan berbagai interaksi yang warnanya di tentukan oleh

keterlibatan actor-aktor yang menciptakan kondisi yang mempengaruhi kehidupan anak jalanan, sehingga kompleksitas kehidupan mereka bukan suatu yang statis melainkan cukup dinamis. Cara-cara yang mereka pergunakan untuk bertahan hidup, berkembang dari waktu ke waktu baik secara individual maupun secara kelompok sebagai suatu proses interaktif dengan perubahan lingkungan sosial ekonomi, budaya dan politik yang terjadi di daerah perkotaan. Tetapi anak yang berlatar belakang non ekonomi dapat di kembalikan dengan cara memperbaiki kondisi, latar belakang ekonomi cukup sulit di cari dari jalanan, namun dapat di berikan ketrampilan untuk alih pekerjaan atau memanfaatkan ekonomi di jalanan.

Tiga model yang banyak di gunakan untuk menangani anak jalanan yaitu :

1. Strategis berbasis di jalan, merupakan suatu program dan kebijakan yang dirancang untuk menjangkau dan melayani anak di lingkungan mereka sendiri yaitu di jalanan.
2. Strategi yang berpusat pada panti yaitu meliputi tempat berlindung sementara, rumah singgah yang meyediakan fasilitas asrama bagi anak-anak jalanan.
3. Strategi berbasiskan masyarakat yaitu strategi pencegahan dan pengembalian anak pada keluarga dan masyarakat.

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

Berdasarkan uraian pada landasan teori di atas, maka secara konseptual dapat di definisikan sebagai berikut :

1. lembaga swadaya masyarakat

Organisasi/ lembaga yang di bentuk oleh masyarakat dengan sukarela atau keinginan sendiri di tengah masyarakat dalam memfasilitasi proses pemecahan masalah di masyarakat.

2. Peran lembaga swadaya masyarakat

Mendukung dan memberdayakan anak jalanan dengan di berikan bekal ketrampilan, keyakinan, pendidikan agar anak jalanan tersebut tidak turun lagi ke jalan.

3. Anak jalanan

Adalah anak yang sebagian besar di jalan menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian.

Definisi operasional adalah bagaimana cara mengatur atau melihat suatu penelitian ini akan bebas dan terarah dengan baik dan jelas.

1. Peran RSAM dalam penanganan masalah anak jalanan :

- Pendampingan anak
- Pemberian motivasi

- Pemberian layanan pendidikan melalui ketrampilan
 - Pelayanan kesehatan
 - Kejar paket pendidikan dasar bagi anak jalanan melalui pendidikan formal dan Non formal
 - PLK (pelayanan layanan khusus)
 - PKAS (pelayanan kesejahteraan sosial anak)
 - Basis jalan
- Komunitas : pendampingan anak di kembalikan ke orang tuanya media untuk anak sebagai media ekspresi dan jembatan komunikasi untuk anak dan masyarakat.
- Resosialisasi, pendampingan pemberdayaan anak.

F .METODE PENELITIAN

1.1 Jenis penelitian

Penelitian ini bermaksud ingin mencermati dan menelaah lebih lanjut jauh peran LSM dalam menanggulang anak jalan di Yogyakarta untuk itu peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersikap deskriptif.

Jenis penelitian metode kualitatif ini dilatar belakangi oleh pemikiran rasional dan menekankan kepada objektivitas. Tujuan penelitian dengan metode kualitatif lebih menitik beratkan kepada usaha untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu dan bukan hanya mencari sebab-akibat dari fenomena yang di teliti. Penelitian kualitatif biasanya amerupakan metode pengumpulan data yang besifat non kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi tentang hubungan-hubungan

sosial sebagaimana dialami responden²⁴. Penelitian kualitatif memfokuskan pada analisis dan pemahaman data sehingga mengutamakan kualitas analisis dari pada data yang bersifat statistic.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana di sajikan situasinya²⁵.

Adapun karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial politik secara jelas dan cermat, maka metode yang di gunakan adalah metode deskriptif. Moh Nazir memberikan pengertian deskriptif sebagai studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat-sifat beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan dan memaksimalkan reliabilitas²⁶.

Hadari Nawawi memberikan pengertian metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, kelompok/ masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya²⁷.

²⁴ Bambang Purwoko, *dalam Sebuah Makalah Diskusi Penelitian, "Metode Ilmiah dan Aplikasinya dalam Penelitian Sosial"*, Yang Di Selenggarakan oleh BEM Fisipol UGM Yogyakarta, 18 Oktober 1997.

²⁵ Iexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Roda Karya, Bandung. 1998

²⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1987

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 1987

Adapun ciri- ciri dari penelitian deskriptif menurut Winarno Surakhmad adalah sebagai berikut : pertama, memusatkan pada pemecahan masalah yang ada sekarang atau masalah-masalah yang actual, dan kedua data- data yang di kumpulkan pertama-tama di jelaskan dan kemudian di analisa²⁸.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri metode penelitian deskriptif di atas maka operasionalnya berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya di susun, diolah dan di tafsirkan. Selanjutnya data yang telah di olah tersebut di beri makna yang rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk meperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat kritis.

1.2 Unit analisa

Adapun yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah :

a. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat

Sampel dari LSM adalah rumah singgah anak mandiri yayasan insan mandiri di Yogyakarta.

b. Anak jalanan

Diambil dari sebagian anak jalanan baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi binaan LSM tersebut.

²⁸Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah? Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung. 1982.

1.3 Jenis data

Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder

A. Data Primer

Data yang di peroleh dari keterangan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, dimana data tersebut di peroleh dari pihak kepala atau staf LSM yayasan insan mandiri maupun anak jalanan.

B. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari buku , artikel, dokumen, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini selain dalam rangka kajian akademis, secara khusus adalah :

Untuk mengetahui bagaimana peran LSM dalam penanganan masalah anak jalanan di Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum untuk mengkaji permasalahan sosial. Khususnya masalah kesejahteraan anak-anak jalanan di Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Untuk kepentingan sebuah organisasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi tambahan di dalam mengembangkan sebuah organisasi sehingga dapat di peroleh solusi menangani dan mengelola sebuah masalah agar menjadi sesuatu yang bermanfaat.

1.4 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam peneliti ini menggunakan teknik penelitian lapangan dan teknik kepustakaan berbeda dengan teknik penelitian kepustakaan yang dilaksanakan sebatas pada riset di perpustakaan atau terhadap dokumen atau naskah-naskah yang berkaitan dengan objek penelitian semata, maka teknik penelitian lapangan dilaksanakan langsung di lokasi penelitian yang sudah di tentukan dengan maksud untuk mendapatkan data atau fakta yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Penggabungan dua teknik ini di maksudkan agar kajian tentang model hubungan maupun pelayanan sosial terhadap anak jalanan dapat lebih optimal.

Dalam penelitian lapangan di gunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi secara langsung melalui Tanya jawab dengan LSM dan anak jalanan, guna memperkuat data sedemikian rupa sehingga dapat di temukan masalah-masalah untuk di analisis dan di rumuskan.

Sebagaimana wawancara dilakukan dengan pihak-pihak RSAM dan anak jalanan agar penelitian dapat di gunakan untuk memperjelas dan mendukung data hasil dan wawancara.

b. **Tekhnik Dokumentasi**

Yaitu tekhnik pengumpulan data yang di peroleh dari buku-buku, dokuen dokumen, catatan-catatan atau laporan-laporan berkaitan dengan penelitian agar dapat di gunakan untuk memperjelas dan mendukung data hasil wawancara.

c. **Tekhnik Observasi**

Tekhnik dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan peran LSM dalam menanggulangi anak jalanan.

1.5 Tekhnik analisa data

Tekhnik penganalisan data sebagaimana dinyatakan Nasution S adalah proses menyusun data agar dapat di tafsirkan. Menyusun data berarti menggolong-golongkan data dalam pola, tema, atau kategori yang telah di tentukan²⁹, setelah data terkumpul selanjutnya di susun, diolah, dan di tafsirkan. Tafsiran dalam penelitian kualitatif ini berarti memberikan makna kepada analisis dan menjelaskan konsep. Interpretasi lebih sebagai upaya menggambarkan perspektif atau pandangan penelitidan bukan suatu kebenaran yang sifatnya mutlak.

Kebenaran dari hasil penelitian ini masih harus dinilai orang lain dan di uji dalam berbagai situasi. Hasil interpretasi ini nantinya juga bukan merupakan

²⁹Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistic Kulaitatif*, Tarsito, Bandung, 1988, Hal.126

generalisasi dalam artian kuantitatif, karena gejala sosial politik yang hendak di teliti terlampau banyak variabelnya dan terlampau terikat oleh konteks dimana dan kapan penelitian dilakukan.

Analisis deskriptif di pergunakan untuk mendeskripsikan objek-objek, kasus-kasus, dan situasi yang di teliti. Dalam penelitian ini analisis tersebut di gunakan untuk mengetahui peran LSM dalam menanggulangi anak jalanan. Dengan tehnik analisa ini peneliti mencoba untuk merangkai kenyataan menjadi suatu cerita, yakni menguraikan secara teratur suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya³⁰.

³⁰ Anto Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, Hal.54